

Equalizing Education with the Undergraduate Program Educating Outermost, Disadvantaged, and Frontier Regions (SM3T)

Pemerataan Pendidikan dengan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T)

Santi Widya Sumardi^{1*}, Ni Putu Angara Wati², Basilius Redan Werang³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: santi.widya@student.undiksha.ac.id

Article info

Keywords:

*Equality,
Education,
SM3T*

Abstract

In developing education in Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia adheres to one of the goals of the Indonesian nation, as stated in the preamble to the 1945 Constitution, paragraph four, namely to educate the nation. The important role of education encourages the government to increase equitable access to education for all people. The quality of education varies, with urban areas often having better facilities and teachers than remote areas. The lack of equality in education hinders infrastructure development and equality of teaching staff. The research methodology used in this study is a literature study, in which researchers collect, analyze, and interpret various relevant data sources from existing literature. Equitable access to education, especially in the 3T (Underdeveloped, 3T) regions, is an absolute must. The SM3T program emphasizes the importance of national values and a spirit of patriotism. Participants are encouraged to view education as a means of enlightening the nation, as mandated by the founders of the Indonesian nation. They are expected to have a strong awareness that teaching in the 3T (Underdeveloped, 3T) regions is not just a job, but a calling to contribute to national development. Thus, this program not only produces qualified educators but also educators who are highly committed to advancing education throughout the country to achieve the nation's ideals. The process of equalizing education is certainly not solely the responsibility of the government or the state. The process of equalizing access to education must be carried out comprehensively by all parties within the Indonesian nation. Equalizing access to education will not be successful without strong cooperation between various parties, including awareness among the communities in the 3T regions themselves. Therefore, if this equal access to education can be achieved, it will become a powerful capital for the future development of the Indonesian nation.

Kata kunci:

Pemerataan,
Pendidikan,
SM3T

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya peran pendidikan mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kualitas pendidikan bervariasi dengan daerah perkotaan sering kali memiliki fasilitas dan guru yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil. Tidak adanya kesetaraan dalam pendidikan menghambat pembangunan infrastruktur dan kesetaraan tenaga pendidik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai sumber data yang relevan dari literatur yang sudah ada. Pemerataan akses pendidikan khususnya di daerah 3T merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Program SM3T menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme. Para peserta didorong untuk melihat pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara Indonesia. Mereka diharapkan memiliki kesadaran yang kuat bahwa mengajar di daerah 3T bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan pendidik yang berkualitas, tetapi juga pendidik yang memiliki komitmen tinggi untuk memajukan pendidikan di seluruh pelosok negeri demi tercapainya cita-cita bangsa. Proses pemerataan pendidikan ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau negara. Proses pemerataan akses pendidikan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh semua pihak yang ada di dalam bangsa Indonesia. Pemerataan akses pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak termasuk juga kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat daerah 3T itu sendiri. Sehingga apabila pemerataan akses pendidikan ini dapat tercapai akan menjadi kekuatan modal pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini kemudian dilandaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Budi, 2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi tersebut jelas membuktikan bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat karena dengan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup diri mereka. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pilar utama bangsa untuk bersaing dalam era global saat ini. Tujuan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah untuk mencetak generasi muda bangsa Indonesia yang mampu menjaga kelanjutan pembangunan nasional di segala bidang menuju tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera serta untuk mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia di masa mendatang. Tidak hanya menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, setiap warga negara Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu pemerintah wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kewajiban pemerintah ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Beberapa standar yang digunakan untuk proses layanan penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam pasal 2 adalah 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan. Salah satu standar dalam mutu pelayanan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dalam hal ini guru/dosen adalah sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali baik di perkotaan maupun di pedesaan bahkan sampai dengan daerah perbatasan atau daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan).

Daerah 3T merupakan daerah yang tergolong terluar, tertinggal, dan terdepan atau berada pada daerah perbatasan terluar wilayah Indonesia. Maksud dari tertinggal yakni memiliki kualitas pembangunan yang rendah, masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan masyarakat daerah lain dalam skala nasional. Kemudian jika dilihat dari segi letak geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Wilayah 3T tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan yang tidak merata dan digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih membutuhkan bantuan dalam berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T dengan penetapan kriteria yakni: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah.

Pentingnya peran pendidikan mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, masih banyak negara yang belum mampu menyediakan pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga ketimpangan pendidikan menjadi perhatian bagi setiap negara saat ini. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Thomas *et al.* (2000) yang menyatakan bahwa akses pendidikan di antara berbagai kelompok di banyak negara sangat tidak merata. Kesenjangan pendidikan dapat sangat terlihat melalui kesenjangan perkembangan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shao.

Kesenjangan pendidikan berkaitan dengan tidak meratanya alokasi dana khusus untuk pendidikan yang disalurkan bagi setiap daerah sehingga menghambat pemerataan pembangunan akses pendidikan. Penelitian Shao *et al.*; Cahyaningsih & Fitraday

menyatakan bahwa dana pendidikan berpengaruh terhadap gini pendidikan. Cahyaningsih & Fitradhy mengatakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan, yaitu karena dana yang dialokasikan untuk setiap daerah sangat bervariasi. Alokasi dana pendidikan yang tidak merata menyebabkan tidak meratanya pembangunan pendidikan setiap daerah. Pemerataan alokasi anggaran dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Lebih jauh lagi, semakin banyaknya pembangunan infrastruktur pendidikan menandakan semakin banyak akses pendidikan yang tersedia bagi masyarakat. Hal tersebut dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Akses pendidikan yang tidak merata berarti banyak anak tidak dapat bersekolah atau harus menempuh jarak jauh. Kualitas pendidikan bervariasi dengan daerah perkotaan sering kali memiliki fasilitas dan guru yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil. Akibatnya, hasil pendidikan juga tidak setimbang, mempengaruhi prestasi akademik dan peluang masa depan peserta didik. Masalah pemerataan pendidikan dipandang penting karena jika peserta didik memperoleh kesempatan belajar pada tingkat SD sampai SMA, maka peserta didik memiliki bekal dasar untuk dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia (Patandung & Panggua, 2022). Dengan demikian peserta didik tidak menjadi terbelakang (penghambat pembangunan), tetapi menjadi pionir dalam pendidikan.

Tidak adanya kesetaraan dalam pendidikan menghambat pembangunan infrastruktur dan kesetaraan tenaga pendidik. Tenaga pendidik lebih banyak tersebar di perkotaan dari pada di pedesaan, sehingga sumber daya pengajar banyak berada di perkotaan (Rosmana *et al.*, 2022). Hal ini mengakibatkan kekurangan guru yang terjadi di daerah pedesaan, lantaran tidak meratanya pembagian tenaga pendidik. Selain itu, infrastruktur di wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terpencil) sangat buruk dan perlunya peningkatan pelayanan. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan keadaan di perkotaan. Dengan demikian keadaan tersebut menjadi faktor utama bagi para pendidik untuk enggan ditempatkan atau ditugaskan di daerah tersebut.

METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai sumber data yang relevan dari literatur yang sudah ada. Studi literatur melibatkan penelusuran terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan temuan yang telah ada, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, menemukan pola dan tren, serta mengembangkan kerangka konseptual yang mendukung penelitian yang dilakukan. Melalui studi literatur, peneliti juga dapat membandingkan berbagai perspektif dan memperoleh data sekunder yang dapat memperkaya analisis serta memberikan landasan teori yang kuat bagi hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Ada tiga tantangan besar pendidikan di Indonesia yang dihadapi saat ini yaitu akses pendidikan bagi semua orang, kualitas pendidikan yang belum merata, dan alokasi

anggaran dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu maka sangat penting untuk menemukan cara-cara baru untuk menyediakan pendidikan yang bermutu, mudah diakses, dan terjangkau bagi semuanya. Melalui pendidikan dapat dilakukan suatu proses sosial dalam masyarakat untuk menuju pada peningkatan kualitas hidup yang mencakup semakin meningkatnya equality, kebebasan dan kemampuan mengendalikan lingkungan. Melalui pendidikan pula dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan intelektual individu sehinggadaya saing yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi semakin tinggi. Globalisasi yang terjadi saat inimenampilkan banyak hal, salah satunya adalahhadirnya lembaga pendidikan asing diIndonesia sebagai konsekuensi logis adanya kesepakatan perjanjian GATS (General Agreementon Trade and Services) menjadikan Indonesia kembali harus mau membuka diri untuk hadirnya perusahaan ataupun lembaga-lembaga asing yang bergerak di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan dan energi.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan pada uraian diatas dapat dicarikan pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen baik seperti hak politik, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan saran yang perlu diperlukan demi terpenuhinya hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan. Dengan asumsi bahwa adanya pendidikan yang tinggi akan memudahkan warga negara mendapatkan pekerjaan sehingga peradaban bangsa menjadi semakin maju.

Daerah 3T menjadi garda terdepan dalam ketahanan dan keamanan nasional karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu pendidikan di daerah 3T menjadi tolak ukur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari tiap generasi dalam pemerataan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. Kriteria dari daerah 3T menjadi pokok permasalahan dalam ketahanan dan keamanan nasional yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah 3T. Kriteria permasalahan lain terkait aksesibilitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan bagi semua masyarakat 3T seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Faktor utama yang menghambat peningkatan mutu pendidikan adalah kurangnya tenaga pendidik.

Daerah 3T merupakan daerah yang tergolong terluar, tertinggal, dan terdepan atau berada pada daerah perbatasan terluar wilayah Indonesia. Maksud dari tertinggal yakni memiliki kualitas pembangunan yang rendah, masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan masyarakat daerah lain dalam skala nasional. Kemudian jika dilihat dari segi letak geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia (Syahril, 2023). Wilayah 3T tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan yang tidak merata dan digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih membutuhkan bantuan dalam berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T dengan penetapan kriteria yakni:

- a. Perekonomian masyarakat;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Kemampuan keuangan daerah;

- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik daerah.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah dan pemerataan guru di daerah 3T yaitu dengan melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T). Namun, upaya ini tampak masih kurang optimal sehingga menjadikan mutu pendidikan di daerah 3T semakin terpuruk ditengah-tengah kemajuan pembangunan nasional dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Hal ini tentu menjadi masalah bagi daerah 3T karena dapat menghambat proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor, membangun kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perlindungan dan ketertiban seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang diperoleh oleh masyarakat (Tommy *et al.*, 2020).

Mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Kebijakan Pendidikan Nasional dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, salah satu programnya adalah Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T). Program SM3T sebagai salah satu Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia ditujukan kepada Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, untuk ditugaskan selama satu tahun pada daerah 3T. Program SM3T dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mengatasi ketertinggalan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia di daerah 3T.

Sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (SM3T) adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T. Program SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan program pendidikan profesi guru. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan terutama dalam kekurangan tenaga pendidik. Selain itu memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidik sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Secara khusus mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah yang tergolong 3T. Program ini mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG) (Persada, 2025). Kegiatan ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal pendidikan tinggi Nomor 64/Dikti/kep/2011 tentang penetapan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) penyelenggara Rintisan program pendidikan profesi guru terintegrasi (berkewenangan ganda).

SM3T merupakan salah satu program untuk mencerdaskan Indonesia, sangat bermanfaat untuk membantu daerah yang kekurangan guru, yang kurang beruntung dalam bidang pendidikan seperti wilayah Papua, NTT, Aceh dan lain sebagainya. Program ini sangat baik dilakukan para calon guru dan masyarakat setempat untuk mendapatkan

pengalaman baru tentang pendidikan nasional, juga untuk menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat 3T sangat membutuhkan guru profesional dan berkualitas, kedatangannya selalu disambut dengan baik. SM3T pertama kali diluncurkan pada tahun 2011, merupakan program pengabdian Sarjana. Selain mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti PPG, program ini juga bertujuan untuk membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik. Setelah lima tahun berjalan, belasan ribu sarjana telah bergabung dalam program SM3T, mengabdikan diri di pelosok negeri.

Program SM3T menargetkan lulusan sarjana yang belum memiliki profesi tetap atau baru memulai karir sebagai calon guru (Itasari, 2021). Selama satu tahun, para peserta program ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang minim akses pendidikan dengan tujuan utama untuk menambah jumlah guru yang tersedia di daerah tersebut. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para sarjana untuk mengembangkan kemampuan mengajar mereka dalam kondisi yang menantang. Melalui program ini, para calon guru diharapkan dapat mengasah keterampilan profesional mereka dalam situasi yang jauh berbeda dari perkotaan. Mereka dilatih untuk menjadi pendidik yang profesional, tangguh, mandiri dan mampu bekerja dalam kondisi yang serba terbatas. Pengalaman mengajar di daerah terpencil membantu mereka membangun ketahanan mental dan keterampilan adaptasi, sekaligus memperdalam pemahaman mereka mengenai tantangan pendidikan di wilayah yang kurang berkembang. Selain itu, calon guru ini didorong untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh peserta didik di daerah terpencil, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

KESIMPULAN

Pemerataan akses pendidikan khususnya di daerah 3T merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Program SM3T menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme. Para peserta didorong untuk melihat pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara Indonesia. Mereka diharapkan memiliki kesadaran yang kuat bahwa mengajar di daerah 3T bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan pendidik yang berkualitas, tetapi juga pendidik yang memiliki komitmen tinggi untuk memajukan pendidikan di seluruh pelosok negeri demi tercapainya cita-cita bangsa.

Proses pemerataan pendidikan ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau negara. Proses pemerataan akses pendidikan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh semua pihak yang ada di dalam bangsa Indonesia. Pemerataan akses pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak termasuk juga kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat daerah 3T itu sendiri. Sehingga apabila pemerataan akses pendidikan ini dapat tercapai akan menjadi kekuatan modal pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu

menyelesaikan jurnal ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan jurnal ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Itasari, E. R. 2021. Program Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Wilayah Perbatasan. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1).
- Nova Mega Persada. 2025. Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerataan Pendidikan, diakses 11 Oktober 2025, http://www.academia.edu/28973964/Analisis_Kebijakan_Pendidikan_Pemerataan_Pendidikan.
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. 2022. Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan Di Daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2).
- Syahril. 2023. Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar Tertinggal Dan Terdepan (SM3T) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Repository IPDN*.
- Thomas, V., Wang, Y., Fan, X., & Bank, W. 2000. Measuring Education Inequality: Gini Coefficients of Education. *World*, 1–37.
- Tommy, M. (2020). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T di Kabupaten Mahakam Hulu